



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Setiap negara selalu berusaha untuk meningkatkan kehidupan perekonomiannya. Dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, negara tidak bekerja sendiri. Masing-masing negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri, dan setiap negara saling membutuhkan satu sama lain.

Untuk saling memenuhi kebutuhan ekonominya, negara melakukan kerja sama. Kerja sama tersebut dapat bersifat bilateral, multilateral, maupun regional. Dalam proses pembentukan kerja sama, negara membentuk sebuah kesepakatan (*agreement*) yang kemudian didalamnya berisi seperangkat aturan mengenai tata cara bagaimana kerja sama tersebut nantinya akan berjalan. Kerja sama antar negara, yang kemudian disebut kerja sama internasional, dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi negara yang bersangkutan, yang kemudian selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.¹

Kerja sama ekonomi internasional itu sendiri membawa dampak baik positif maupun negatif bagi negara-negara yang terlibat dalam aktivitas kerja sama ekonomi internasional. Dampak positif dari kerja sama ekonomi internasional, diantaranya adalah memperlancar arus perdagangan

¹Yusuf Munandar, *Menemukan Arah Kerja Sama Ekonomi Indonesia Dengan Negara Mitra*, Yogyakarta, 2014, hal. 26.



internasional, mengatasi permasalahan ekonomi secara bersama, meningkatkan daya saing, serta dapat memperkuat posisi perdagangan suatu negara.² Namun ada beberapa dampak negatif yang muncul dari kerja sama internasional yang perlu diperhatikan oleh negara, yaitu adanya kecenderungan negara menjadi sangat bergantung dengan negara lain, masuknya pasar asing terlalu jauh kedalam negeri, dan tutupnya usaha-usaha dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan produk asing.³

Semakin berkembangnya kebutuhan ekonomi negara, kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh negara pun semakin berkembang. Hal-hal yang menjadi pembahasan dalam kerja sama tersebut tidak lagi semata-mata hanya sebatas impor-ekspor serta pertukaran barang dan jasa, namun sudah mulai merambat kepada hal-hal seperti pembentukan regulasi bersama yang mengatur jalannya kerja sama tersebut. Selain itu, negara melakukan kerja sama ekonomi sebagai bentuk persaingan terhadap negara lain ataupun aktor lain yang dianggap dapat menjadi ancaman ekonomi apabila negaranya tidak melakukan kerja sama.

Salah satu bentuk kerja sama terbaru yang muncul adalah *Trans-Pacific Partnership*. *Trans-Pacific Partnership* atau yang kemudian disebut sebagai TPP adalah kerja sama ekonomi yang dibentuk pada tahun 2015 yang mencakup beberapa negara-negara *pacific rim*, negara-negara yang berbatasan dengan Samudera Pasifik. TPP dibentuk oleh Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama beserta sebelas negara Pasifik lainnya yaitu, Meksiko, Kanada, Australia, Selandia Baru, Malaysia,

²*Ibid.*

³*Ibid.*



Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, Jepang, Chile, dan Peru. Pembentukan kerja sama ekonomi ini merupakan sebagai salah satu cara Amerika Serikat untuk mengantisipasi peningkatan ekonomi Tiongkok yang semakin berkembang.⁴

TPP sendiri berawal dari perjanjian ekonomi antara empat negara yaitu Brunei Darussalam, Chile, Selandia Baru, dan Singapura yang ditandatangani pada tahun 2005. Kerja sama ekonomi ini bernama *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership*.⁵ Tujuan utama dari kerja sama ini adalah memperluas jaringan perdagangan serta menciptakan keberagaman pasar antar negara-negara anggota. Selain itu pembentukan kerja sama *Trans-Pacific SEP* diharapkan dapat menciptakan liberalisasi pasar yang lebih jauh didalam lingkungan APEC sehingga memudahkan perdagangan yang lebih terbuka dan memberikan ruang lebih leluasa terhadap investasi.⁶

TP-SEP sendiri atau dikenal juga sebagai P4 mulai berlaku efektif pada tahun 2006.⁷ Kemudian pada tahun 2008, Amerika Serikat mulai menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung dalam TP-SEP dengan pernyataan Perwakilan Dagang Amerika Serikat, Susan C. Schwab, mengenai rencana Amerika Serikat untuk bergabung kedalam TP-SEP pada September

⁴BBC, *TPP: What is it and why does it matter?*, dalam <http://www.bbc.com/news/business-32498715>, diakses pada 24 November 2017.

⁵New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement*, dalam <https://web.archive.org/web/20130210151458/http://mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/2-Trade-Relationships-and-Agreements/Trans-Pacific/0-history.php>, diakses pada 27 November 2017.

⁶*Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement*, bab 1, artikel 1.1, poin 3, hal 1-1.

⁷New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPSEP or P4)*, dalam <https://www.mfat.govt.nz/en/about-us/who-we-are/treaties/trans-pacific-strategic-economic-partnership-tpsep-or-p4/>, diakses pada 13 Januari 2018



2008.⁸ Tidak hanya itu, Amerika Serikat kemudian juga mengajak Australia, Peru dan Vietnam untuk ikut serta dalam rencana negosiasi pembentukan kerjasama *Trans-Pacific Partnership*.

Beberapa poin yang menjadi perhatian penting dalam negosiasi pembentukan kerja sama ekonomi antar negara-negara pasifik ini antara lain adalah untuk mempererat hubungan dagang khususnya Amerika Serikat dengan negara-negara pasifik yang menjadi anggota dalam negosiasi tersebut, memperluas pasar di kawasan Asia-Pasifik, menghapuskan tarif, serta memperkuat aturan hukum hak kekayaan intelektual untuk menjamin produk yang beredar didalam kawasan.⁹

Upaya mempererat hubungan dagang ini merupakan sebagai strategi Amerika Serikat untuk memperkuat pengaruhnya di Asia-Pasifik menghadapi Tiongkok yang saat itu mulai menguat dalam hal perkembangan ekonomi.¹⁰ Selain itu, kerja sama ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi antar negara-negara yang menjadi anggota, serta membuka peluang pasar baru yang lebih besar dan lebih beragam.¹¹

Proses negosiasi pembentukan TPP terdiri dari 9 tahap, dengan putaran pertama dimulai pada Maret 2010 di Melbourne, Australia, putaran kedua dimulai di San Francisco, Amerika Serikat pada Juni 2010, putaran ketiga dimulai pada Oktober 2010 di Brunei Darussalam, tahap keempat berlangsung pada awal Desember 2010 di Auckland, Selandia Baru, tahap

⁸Pernyataan Susan C. Schwab dihadapan menteri perdagangan Brunei Darussalam, Chile, Selandia Baru, dan Singapura di New York, dalam <https://ustr.gov/schwab-statement-launch-us-negotiations-join-trans-pacific-strategic-economic-partnership-agreement>, diakses pada 1 Desember 2017.

⁹*Trans-Pacific Partnership Agreement*, Pembuka.

¹⁰BBC, *Loc. Cit.*

¹¹*Ibid.*



kelima berlangsung pada pertengahan Februari 2011 di Santiago, Chile; tahap keenam dimulai di Singapura pada April 2011, tahap ketujuh berlangsung di Vietnam pada Juni 2011, tahap kedelapan dilaksanakan kembali di San Francisco pada September 2011, dan tahap kesembilan dilaksanakan di Peru pada Oktober 2011.¹²

Rancangan kesepakatan perjanjian kerja sama TPP kemudian mulai disusun pada tahun 2015 dan mencapai kesepakatan dengan ditandatangani oleh 12 negara pada Februari 2016.¹³ Jika TPP sudah mulai diimplementasikan nantinya, perjanjian kerjasama ekonomi terbesar di dunia ini akan mencakup sebesar 40 persen dari ekonomi dunia dengan nilai perdagangan yang diperkirakan mencapai hampir 300 miliar dolar Amerika.¹⁴

Negosiasi *Trans-Pacific Partnership* secara umum menekankan pada beberapa poin yang berhubungan dengan kemudahan aktivitas perdagangan seperti penghapusan tarif, dan pembentukan regulasi bersama. Contoh pembentukan regulasi bersama dalam TPP salah satunya adalah mengenai masalah hak kekayaan intelektual.

Masalah hak kekayaan intelektual dalam perdagangan sebelumnya telah diatur dalam perjanjian yang bernama *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS).¹⁵ TRIPS merupakan perjanjian yang mengatur tentang standar minimal internasional terhadap perlindungan

¹² United State Trade Representative, *Trans-Pacific Partnership*, dalam <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership>, diakses pada 5 Maret 2018.

¹³ BBC, *Loc. Cit.*

¹⁴ BBC News, *Trans-Pacific Partnership: What is it and what does it mean?*, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=CCy7QxjsSy4>, diakses pada 6 Maret 2018.

¹⁵ Miriam Bitton, "Examining the Trans-Pacific Agreement", dalam *Journal of Internet Law*, 2014, hal. 25.



kekayaan intelektual. Perjanjian ini sebagai dasar dibentuknya Organisasi Perdagangan Global (WTO) dan setiap negara anggota WTO wajib meratifikasi perjanjian tentang hak kekayaan intelektual tersebut. Perjanjian TRIPS mengharuskan setiap negara anggota WTO untuk memberikan hak paten, indikasi geografis, merek dagang, serta hak cipta.¹⁶

Dalam negosiasi TPP, pelaksanaan terhadap hukum kekayaan intelektual mengalami perubahan. Amerika Serikat menginginkan adanya pendekatan yang lebih ketat, sementara negara-negara lain menginginkan pendekatan yang lebih fleksibel.¹⁷ Seperti dalam hukum paten, Amerika Serikat mengusulkan untuk dilakukan perluasan cakupan dalam perlindungan hukum paten, meliputi aktivitas penemuan yang berhubungan dengan hewan dan tumbuhan.

Amerika Serikat juga mengusulkan untuk memberlakukan perlindungan hukum paten terhadap prosedur bedah, tidak hanya pada manusia namun juga pada hewan.¹⁸ Selain itu, Amerika Serikat juga mengusulkan perlindungan hak paten terhadap obat-obatan untuk mencegah adanya persaingan terutama obat-obatan generik.

Kemudian dalam masalah hak cipta, Amerika Serikat mengusulkan untuk memperpanjang masa perlindungan hak cipta dari standar yang ada yaitu 70 tahun setelah kematian penulis menjadi 100 tahun setelah kematian penulis. Disamping itu Amerika Serikat juga mengusulkan untuk memberlakukan hukuman tindak pidana kriminal kepada aktor-aktor yang

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*, hal. 31.



diketahui melakukan pembajakan dan pemalsuan merek dagang, ataupun pelanggaran hak cipta.¹⁹

Namun, negosiasi kerja sama ekonomi antar negara-negara Pasifik ini menuai berbagai kritik, diantaranya adalah negosiasi ini berlangsung secara tertutup, rincian jelas dari proses negosiasi ini tidak banyak yang diketahui oleh publik Amerika.²⁰ Negosiasi ini dinilai lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. Pembentukan TPP juga dinilai tidak memberikan manfaat yang begitu besar terhadap para pekerja Amerika dan mengancam kedaulatan negara.²¹

Ancaman tersebut dilihat dari sisi bahwa apabila TPP sudah dijalankan, hal ini akan membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan untuk semakin memperluas kendali mereka terhadap pasar. Perusahaan dapat menuntut pemerintah apabila ada perubahan kebijakan yang dianggap merugikan pihak pelaku usaha.²² Selain itu, TPP juga dianggap sebagai ‘ajang persaingan’ para tenaga kerja dari negara-negara anggota.²³ Presiden Donald Trump menilai ini merupakan hal buruk terutama bagi para pekerja Amerika.²⁴

Dengan dijalankannya TPP maka hambatan tarif antar negara-negara anggota menjadi hilang dan perusahaan serta produk dari negara anggota

¹⁹*Ibid*, hal. 32.

²⁰Natalie Sears, “*Trans-Pacific Partnership – Is it really “NAFTA on Steroids”?*”, dalam jurnal *Law and Business Review of the Americas*, 2015, hal. 107-108.

²¹RT America, *Costs of TPP will be bad for America, smaller countries – health and trade advocate*, dalam https://www.youtube.com/watch?time_continue=224&v=qBNvI20lSfo, diakses pada 13 Maret 2018.

²²Natalie Sears, *Op.cit*, hal. 108-109.

²³Laporan analisis oleh berbagai lembaga perserikatan dan lembaga *think tank* terhadap salinan draft kesepakatan *Trans-Pacific Partnership*, pdf.

²⁴ Al-Jazeera, *Trump withdraws US from Trans-Pacific Partnership deal*, dalam <https://www.aljazeera.com/news/2017/01/trump-withdraws-trans-pacific-partnership-tpp-deal-170123170334145.html>, diakses pada 6 Maret 2018.



dengan mudah masuk ke Amerika. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan Amerika mendirikan pabriknya diluar Amerika dengan tujuan memangkas biaya produksi dan mencair tenaga kerja murah, yang kemudian dapat membuat para pekerja Amerika kehilangan pekerjaan.²⁵

Pada tahun 2015, salinan dari draft rancangan kesepakatan TPP bocor melalui situs *WikiLeaks* dan memicu protes dari berbagai kalangan masyarakat dunia.²⁶ Analisis yang dilakukan oleh berbagai lembaga perserikatan, organisasi, dan lembaga *think tank* terhadap draft yang bocor tersebut menunjukkan beberapa poin yang dinilai merugikan khususnya bagi publik Amerika Serikat diantaranya mekanisme perlindungan investor yang memungkinkan para investor untuk menempatkan basis produksi usaha mereka di negara dengan upah kerja yang rendah tanpa mengeluarkan biaya yang besar.²⁷

Kemudian masalah tentang upah bagi pekerja Amerika. Analisis tersebut menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan terhadap upah pekerja Amerika karena harus bersaing dengan pekerja dari Vietnam yang notabenehnya dibayar 65 sen per jam.²⁸ Selain itu, Amerika juga terancam akan kebanjiran dengan produk makanan impor tidak sehat karena belum adanya inspeksi kesehatan dan keamanan makanan. Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan bahwa akan terjadi kenaikan harga obat-obatan karena perusahaan obat-obatan besar akan memiliki hak monopoli terhadap pasar

²⁵*Ibid.*

²⁶RussiaToday, *TPP signing sparks dozen of protests across US over biggest trade pact*, dalam <https://www.rt.com/usa/331356-tpp-signing-protests-usa/>, diakses pada 6 Maret 2018.

²⁷Analisis oleh berbagai lembaga perserikatan dan lembaga *think tank* terhadap salinan draft kesepakatan *Trans-Pacific Partnership*, pdf.

²⁸*Ibid.*



obat-obatan, yang dapat menyingkirkan obat-obatan generik dengan harga murah kalah saing.²⁹

Dari dokumen yang bocor tersebut juga disebutkan bahwa Amerika Serikat mengajukan untuk memperpanjang batas jangka waktu perlindungan hak cipta untuk produksi individu hingga 120 tahun setelah kematian penulis, dan 95 tahun setelah publikasi pertama apabila pemegang hak cipta adalah korporasi. Hal ini dinilai hanya akan menguntungkan perusahaan karena perusahaan memiliki jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang terhadap karya cipta yang diproduksinya.³⁰ Analisis terhadap draft salinan yang bocor tersebut juga menunjukkan bahwa negosiasi ini tidak memberikan ruang kepada Kongres untuk berpartisipasi dalam menentukan peraturan tentang keanggotaan dalam TPP, artinya lembaga eksekutif bebas menentukan siapa saja yang boleh bergabung kedalam TPP.³¹

Kemudian, ketika Donald Trump maju mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat berikutnya, ia berjanji dalam kampanyenya akan menarik Amerika Serikat dari negosiasi kerja sama ekonomi Pasifik tersebut.³² Setelah dilantik menjadi presiden pada Januari 2017, Donald Trump membuat dan menandatangani perintah eksekutif yang ditujukan kepada perwakilan dagang Amerika Serikat (*United States Trade Representative*) untuk menarik diri dari *Trans-Pacific Partnership*.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.* hal. 34.

³¹*Ibid.*

³² Wall Street Journal, *Trump: TPP 'Greatest Danger Yet' to U.S. Manufacturing*, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=4XCeXP4azg>, diakses pada 6 Maret 2018.



Dalam memorandum tersebut, Presiden Trump menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk melindungi para pekerja Amerika Serikat. Presiden, dalam perintah eksekutif tersebut juga menyatakan akan tetap menjalin hubungan dagang dengan negara tetangga secara bilateral dalam rangka menciptakan lingkungan perekonomian dan perdagangan yang lebih adil.³³

Kemudian pada akhir Januari 2017, perwakilan dagang Amerika Serikat mengirimkan surat kepada Kantor Perwakilan TPP di Selandia Baru yang menyatakan Amerika Serikat secara resmi mengundurkan diri dari negosiasi sama *Trans-Pacific Partnership*.³⁴ Hingga pengunduran diri Amerika Serikat dari kerja sama tersebut, hanya Jepang yang sudah meratifikasi perjanjian tersebut yaitu pada Desember 2016³⁵ disusul Selandia Baru yang meratifikasi perjanjian tersebut pada Mei 2017.³⁶

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor apa saja yang kemudian mendorong perilaku Amerika Serikat untuk keluar dari kerja sama *Trans-Pacific Partnership*. Isu ini menjadi menarik karena terdapat anomali atau ketidaksesuaian dalam proses negosiasi TPP, dimana Amerika Serikat menjadi promotor dari negosiasi tersebut namun pada akhirnya mengundurkan diri dan menyatakan keluar.

³³Presidential Memorandum Regarding Withdrawal of the United States from the Trans-Pacific Partnership Negotiations and Agreement, dalam <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-regarding-withdrawal-united-states-trans-pacific-partnership-negotiations-agreement/>, diakses pada 6 Maret 2018.

³⁴Surat Pengunduran Diri Amerika Serikat dari Trans-Pacific Partnership, pdf.

³⁵Kevin Lamarque, *Japan Ratifies TPP Trade Pact to Fly the Flag for Free Trade*, dalam <https://www.reuters.com/article/us-japan-tpp/japan-ratifies-tpp-trade-pact-to-fly-the-flag-for-free-trade-idUSKBN13Y0CU>, diakses pada 7 Desember 2017.

³⁶Selandia Baru meratifikasi perjanjian TPP pada Mei 2017, dalam <https://www.tpp.mfat.govt.nz/>, diakses pada 7 Desember 2017.



Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku Amerika Serikat tersebut penulis akan menggunakan konsep *Adaptive Behavior* yang dikemukakan oleh James N. Rosenau. Penelitian ini nantinya akan bersifat eksplanatif, dimana penulis akan mencoba mencari keterkaitan antar variabel yang ada untuk kemudian menjelaskan kebijakan Amerika Serikat untuk keluar dari TPP sebagai perilaku adaptasi terhadap lingkungan yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, rumusan masalah yang akan diteliti adalah “Mengapa Amerika Serikat mengundurkan diri negosiasi *Trans-Pacific Partnership* pada tahun 2017?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengunduran diri Amerika Serikat dari negosiasi *Trans-Pacific Partnership* pada tahun 2017 kemudian membentuk perilaku Amerika Serikat terhadap TPP.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Sebagai salah satu persyaratan kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional dengan peminatan *Global Transformation*.



2. Sebagai referensi keilmuan baru yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan keilmuan khususnya bagi civitas akademik dilingkungan Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai sarana untuk menguji keilmuan penulis dalam Hubungan Internasional khususnya dalam memahami perilaku negara menggunakan teori/konsep yang penulis pelajari.
2. Sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan penulis mengenai teori/konsep yang digunakan dalam penelitian ini dan menjadi modal penulis dalam melakukan penelitian selanjutnya.